



Media: Jawa Pos

Hari: Selasa

Tanggal: 15 Maret 2011

Halaman: 2

Batan Jalin Kerja Sama dengan LPSE

JOGIA – Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik pemerintah kota Jogjakarta melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di kompleks balai kota, Senin (14/3). Hal itu terkait rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan Batan.

Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Batan Isman Mulyadi Triatmoko mengatakan, dalam waktu dekat, Batan akan melakukan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan lembaganya. Karena pihaknya belum memiliki LPSE sendiri, maka Batan harus menggandeng LPSE dari lembaga pemerintah yang lain. "Regulasinya ada di Perpres (Peraturan Presiden, red) Nomor 54 Tahun 2010," kata Isman.

Isman memperkirakan, nilai untuk peng-

adaan barang mencapai angka Rp 1 milyar lebih. Selain itu, sebagian besar peralatan yang dibutuhkan Batan berasal dari luar negeri. Sehingga, Batan merasa perlu untuk menggandeng LPSE dalam proses *e-tendering*. "Kebutuhannya termasuk tenaga pengaman, Boroskop dan AAS (*Atomic Absorption Spectrophotometry*)," tutur Isman.

Sementara itu, Edy Muhammad, Kepala Bagian Pengendalian Bangunan Kota Jogjakarta mengatakan, penggunaan LPSE merupakan salah satu cara untuk menekan biaya pengadaan barang. Sebab, dalam proses *e-tendering*, proses tawar-menawar tidak mengharuskan kedua belah pihak bertemu. Sehingga, mereka bisa memangkas biaya transportasi.

Saat ini, ada 12 lembaga yang telah melaku-

kukan kerjasama dengan LPSE. Mereka terdiri dari lembaga pendidikan, rumah sakit, dan kepolisian. Rinciannya adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga,



LELANG: Isman Mulyadi Triatmoko

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Akademi Teknik Kulit, Kementerian Dalam Negeri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, Kejaksaan Negeri Kota Jogjakarta, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jogjakarta, Rumahsakit (RS) Sarjito, Institut Seni Indonesia (ISI) Jogjakarta, dan Istana Kepresidenan Gedung Agung.

Menurut Edy, untuk saat ini, bagi lembaga yang belum memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang dimiliki lembaga lain. Namun pada 2012, semua kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan instansi yang menggunakan APBD wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. "Aturannya seperti itu," pungkas Edy. (ang/yus)

Kepada Yth. :
 Kepala
 Bagian Tata Usaha
 Badan Tenaga Nuklir Nasional
 Jalan Kenari No. 56
 Yogyakarta, Kode Pos 55165
 Telp. (0274) 515865, 562682

Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak
----------	--------------	-------	--------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Pengendalian Pembanguna	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005